

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan hidup saat ini menjadi tantangan global yang memerlukan respons lokal yang strategis dan berkelanjutan. Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekitar 50 juta jiwa per 2023 (BPS Jawa Barat), menghadapi tekanan ekologis yang tinggi akibat laju urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta aktivitas industri dan domestik yang masif. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat memainkan peran penting dalam mengembangkan program edukasi dan sosialisasi sebagai upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.

Program edukasi dan sosialisasi lingkungan hidup menjadi salah satu strategi utama DLH dalam membangun budaya peduli lingkungan di masyarakat. Program ini mencakup berbagai pendekatan seperti penyuluhan langsung, kampanye publik, pelatihan komunitas, penggunaan media sosial, serta kegiatan berbasis sekolah dan komunitas. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan perilaku individu dan kolektif, khususnya dalam pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta pencegahan pencemaran lingkungan (Fitriani et al., 2024).

Meskipun berbagai program telah dijalankan, permasalahan lingkungan di Jawa Barat masih menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Volume timbunan sampah yang terus meningkat setiap tahun belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya efektivitas kebijakan dan implementasi program lingkungan, khususnya pada aspek perubahan perilaku masyarakat.

Kondisi tersebut penting untuk ditinjau secara empiris guna memahami sejauh mana permasalahan lingkungan di Jawa Barat masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah. Data mengenai timbunan dan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Produksi dan Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (2024)

Kategori	Nilai estimasi / data	Keterangan
Total produksi sampah	± 25.000 ton/hari (\approx 6,1 juta ton/tahun)	Produksi sampah Jawa Barat 2024 dilaporkan 6,1 juta ton/tahun atau $\sim 16,85$ ribu ton/hari.
Sampah terkelola	$\sim 2,4$ juta ton/tahun	Dari produksi tersebut, $\sim 2,4$ juta ton dikelola.
Sampah tidak terkelola	$\sim 3,7$ juta ton/tahun	Sisanya diperkirakan belum tertangani ($\sim 3,7$ juta ton).
Proporsi sampah rumah tangga	63,53 %	Sumber utama sampah Jabar pada 2024 adalah rumah tangga, 63,53 %.
Komposisi sampah (organik vs anorganik)	60 % / 40 %	Disebutkan bahwa komposisi sampah di Jabar tetap 60 % organik dan 40 % non-organik.

Sumber: DeskJabar, (2024). Produksi sampah Jawa Barat

Pada tabel 1.1 tersebut memperlihatkan bahwa berdasarkan data terbaru tahun 2024, produksi sampah di Jawa Barat diperkirakan mencapai ± 25000 ton per hari atau sekitar 6,1 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2,4 juta ton yang berhasil dikelola, sedangkan sisanya $\pm 3,7$ juta ton masih belum tertangani secara optimal. Artinya, lebih dari separuh timbulan sampah di Jawa Barat masih berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan serius, mulai dari pencemaran air, udara, hingga meningkatnya risiko kesehatan masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa sumber utama sampah berasal dari rumah tangga, yakni sebesar 63,53 persen, sehingga menunjukkan bahwa pola konsumsi dan

perilaku masyarakat menjadi faktor dominan dalam persoalan persampahan. Dari sisi komposisi, sampah masih didominasi oleh sampah organik sebesar 60 persen dan anorganik 40 persen. Sebenarnya, komposisi tersebut dapat menjadi peluang apabila dikelola dengan baik, misalnya melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos, pupuk cair, atau biogas, serta mendaur ulang sampah anorganik untuk mengurangi beban TPA. Namun, realitas menunjukkan bahwa upaya tersebut belum maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber. Data ini menegaskan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Barat tidak hanya terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kesadaran, partisipasi, dan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat menjadi sangat penting, karena hanya dengan dukungan perilaku kolektif masyarakat yang lebih peduli dan bertanggung jawab, persoalan sampah yang semakin kompleks ini dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan persampahan di Jawa Barat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan perilaku. Menurut (Sutrisno, 2007) efektivitas suatu program sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Artinya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas atau kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, program edukasi dan sosialisasi lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai instrumen perubahan perilaku. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan kampanye, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat tahun 2022, sekitar 42% sungai di wilayah ini masuk

dalam kategori tercemar berat. Pencemaran tersebut didominasi oleh limbah domestik dan sampah rumah tangga (Abidin, 2023). Selain itu, kualitas udara di kawasan metropolitan seperti Bandung Raya juga mengalami penurunan, dengan indeks kualitas udara (AQI) yang kerap kali melampaui ambang batas sehat. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara kebijakan, program edukasi, dan realitas di lapangan (Pontoh et al., 2023).

Masalah lain yang mencuat adalah metode edukasi yang cenderung sporadis, seremonial, dan tidak berkelanjutan. Banyak kegiatan sosialisasi hanya dijadikan pelengkap agenda, tanpa indikator keberhasilan yang jelas maupun proses monitoring yang sistematis. Padahal, perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai melalui kegiatan seremonial, melainkan melalui strategi komunikasi yang konsisten, berbasis data lokal, dan adaptif terhadap keragaman sosial-budaya masyarakat Jawa Barat (Tenriawi, 2024).

Laporan Sosialisasi Aplikasi SIDIA 2024 yang diterbitkan DLH Jawa Barat menunjukkan bahwa kegiatan daring melalui Zoom mampu melibatkan 92 peserta dari berbagai instansi DLH, dan ditonton lebih dari 200 orang melalui kanal YouTube. Namun, partisipasi yang besar tersebut belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan, karena interaksi yang terbatas dan peserta yang cenderung didominasi aparatur pemerintah. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap capaian dan dampak nyata dari program edukasi lingkungan yang dijalankan.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat telah berupaya mengimplementasikan sejumlah program edukasi dan sosialisasi lingkungan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Program-program tersebut dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari sosialisasi kebijakan, pelatihan teknis pengelolaan sampah, pengembangan sekolah Adiwiyata, hingga kampanye publik berbasis media digital.

Menurut (Creswell, 2014) penyusunan data program perlu digunakan bukan hanya sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai efektivitas dan konsistensi antara tujuan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penyajian data mengenai program edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh

DLH Jawa Barat menjadi penting untuk melihat sejauh mana kegiatan tersebut terarah dan relevan dengan permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Adapun bentuk dan jenis program edukasi lingkungan yang telah dijalankan oleh DLH Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Lingkungan oleh DLH Jawa Barat

Tahun	Kegiatan/Program	Pelaksana	Target/Lokasi
2022	Edukasi pengelolaan sampah organik dengan maggot & mobil edukasi lingkungan pada Bazar DWP dalam rangka Hari Bumi	DLH Provinsi Jawa Barat	±1.586 pengunjung Bazar, Kota Bandung
2022	Peringatan Hari Lingkungan Hidup: sosialisasi biokonversi sampah organik & kampanye “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”	DLH Provinsi Jawa Barat & Pemkab Garut	Masyarakat umum, Alun-Alun Garut
2025	Sosialisasi Permen LHK No. 14 Tahun 2024 tentang pengawasan & sanksi lingkungan kepada pelaku usaha	DLH Provinsi Jawa Barat & DLH Kota/Kabupaten terkait	±80 usaha di wilayah DAS Kali Bekasi
2025	Layanan pengembangan kapasitas masyarakat: fasilitasi bank sampah induk/unit & edukasi pengolahan sampah organik	DLH Provinsi Jawa Barat	Kabupaten/kota se- Jawa Barat, komunitas & masyarakat
2025	Program sosialisasi & bimbingan teknis sekolah berbudaya lingkungan (Adiwiyata)	DLH Provinsi Jawa Barat	Sekolah SD, SMP, sederajat di Jawa Barat

Sumber: Laporan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, (diolah Peneliti, 2025).

Data pada tabel 1.2 memperlihatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah dilakukan dalam berbagai bentuk dan melalui beragam pendekatan. Misalnya, pada tahun 2022 DLH menggelar edukasi pengolahan sampah organik menggunakan maggot atau larva lalat Black Soldier Fly (BSF) serta mobil edukasi lingkungan dalam rangka peringatan Hari Bumi di Bazar DWP Bandung yang diikuti oleh sekitar 1.586 pengunjung. Pada tahun yang sama, DLH juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup melalui kegiatan sosialisasi biokonversi sampah organik dan kampanye. Selanjutnya, pada tahun 2025 DLH Provinsi bersama DLH kabupaten/kota mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya pengawasan dan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, dengan melibatkan sekitar 80 pelaku usaha di wilayah DAS Kali Bekasi. Di samping kegiatan berbasis event, DLH Jawa Barat juga menyediakan layanan berkelanjutan berupa fasilitasi bank sampah induk dan unit, pelatihan pengolahan sampah organik, serta program sosialisasi dan bimbingan teknis bagi sekolah-sekolah dalam kerangka program Adiwiyata. Fakta ini menunjukkan bahwa DLH Jawa Barat tidak hanya mengandalkan acara seremonial, tetapi juga membangun kanal edukasi yang bersifat lebih struktural dan berkesinambungan.

Meskipun berbagai program telah dijalankan dengan bentuk dan sasaran yang beragam, belum ada kajian yang secara spesifik menilai sejauh mana program-program tersebut berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Menurut (Sutrisno, 2007) efektivitas suatu program dapat dilihat dari ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan dampak yang dihasilkan. Berdasarkan pandangan tersebut, kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan DLH Jawa Barat perlu dianalisis lebih jauh, apakah telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat atau masih terbatas pada kelompok tertentu seperti pelaku usaha dan aparatur pemerintah. Selain itu, jika dikaitkan dengan konsep evaluasi program menurut (Creswell, 2014) efektivitas tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari tingkat pemahaman, partisipasi, dan perubahan

perilaku yang muncul setelah kegiatan dilakukan. Hal ini penting, karena keberhasilan program lingkungan tidak dapat diukur hanya melalui kuantitas peserta atau frekuensi kegiatan, tetapi melalui transformasi sikap dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

Dengan demikian, data pada Tabel 1.2 bukan hanya menunjukkan keberagaman aktivitas yang dilakukan DLH Jawa Barat, tetapi juga mengindikasikan perlunya penelitian untuk menilai sejauh mana program-program tersebut telah diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, intensitas dan variasi kegiatan edukasi tersebut masih menyisakan pertanyaan penting terkait efektivitasnya. Selama ini keberhasilan program cenderung diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau banyaknya peserta yang hadir, bukan dari perubahan perilaku masyarakat secara nyata dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini terlihat dari masih tingginya timbulan sampah di Jawa Barat yang mencapai lebih dari 25.000 ton per hari, dengan sekitar 40 persen di antaranya belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara usaha edukatif pemerintah dengan dampak yang dihasilkan terhadap perilaku masyarakat. Dengan kata lain, meskipun DLH telah berupaya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dalam berbagai format, efektivitas program ini masih belum dapat dipastikan tanpa evaluasi berbasis bukti yang komprehensif.

Ironisnya, studi oleh Harian Ekologi Indonesia (2022) mengungkap bahwa hanya 24% warga Jawa Barat yang benar-benar memahami regulasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara intensitas kegiatan sosialisasi dengan pemahaman masyarakat terhadap substansi lingkungan. Tanpa adanya data dan evaluasi berbasis bukti, sulit untuk memastikan bahwa kegiatan edukasi yang selama ini dilakukan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan sosialisasi berisiko menjadi seremonial dan tidak efektif apabila tidak disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai.

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat sebagai lembaga teknis yang memiliki

tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan lingkungan di tingkat daerah telah melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi lingkungan. Program-program ini meliputi penyuluhan ke sekolah dan masyarakat, pembentukan komunitas lingkungan, lomba kampung bersih, pelatihan pengelolaan sampah, hingga kampanye di media sosial dan media massa. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Namun demikian, keberhasilan program-program ini belum banyak dievaluasi secara sistematis dan menyeluruh, terutama dalam mengukur dampaknya terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat (Surya & Andini, 2024).

Sejalan dengan konteks Jawa Barat, fenomena serupa juga dapat ditemukan di berbagai provinsi dan kota besar lain di Indonesia. Program edukasi dan sosialisasi lingkungan tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, tetapi juga menjadi perhatian di DKI Jakarta, Surabaya, Malang, Bandar Lampung, hingga Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa isu sosial terkait efektivitas edukasi lingkungan bersifat lintas daerah. Menurut (Creswell, 2014) penyajian data lintas wilayah atau studi perbandingan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini membantu peneliti melihat pola, kesamaan, dan perbedaan antar daerah dalam mengimplementasikan program serupa. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berfokus pada satu lokasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

Dalam konteks penelitian ini, perbandingan antar daerah penting untuk menunjukkan bahwa tantangan efektivitas program edukasi lingkungan bukan hanya dialami oleh Jawa Barat, tetapi juga oleh provinsi dan kota besar lain di Indonesia. Setiap daerah memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda, namun permasalahan yang dihadapi sering kali serupa—seperti partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya, serta pendekatan edukasi yang masih bersifat seremonial. Oleh karena itu, penyajian data pada Tabel 1.3 berikut dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana program edukasi dan sosialisasi lingkungan diterapkan di berbagai daerah serta memberikan pembelajaran

komparatif yang dapat memperkaya analisis penelitian ini. Dari hasil perbandingan tersebut, peneliti berharap dapat mengidentifikasi posisi dan karakteristik unik program edukasi lingkungan di Jawa Barat, sekaligus menegaskan urgensi evaluasi efektivitasnya secara lebih mendalam.

Tabel 1. 3 Isu Sosial dan Program Edukasi dan Sosialisasi Lingkungan di Kota Besar Indonesia

Kota/Provinsi	Program/Penelitian	Bentuk Kegiatan	Temuan/Data
DKI Jakarta	Program & Kegiatan DLH DKI Jakarta	Kampung Iklim, edukasi sampah plastik, pelatihan komunitas, sekolah Adiwiyata	Data kegiatan tercatat di portal <i>Satu Data Indonesia</i> , mencakup jenis kegiatan, frekuensi, dan wilayah
Surabaya (Jatim)	Program PURING (Pelajar Unggul Ramah Lingkungan)	Ekstrakurikuler lingkungan di SMPN 4 Surabaya	Penelitian pada 52 responden menunjukkan peningkatan kepedulian siswa pada penghijauan & pengelolaan sampah
Surabaya (Jatim)	PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas)	Edukasi & pemberdayaan warga di Kelurahan Kedung Cowek	Efektif mewujudkan <i>community governance</i> berbasis lingkungan
Malang	Sekolah Adiwiyata	Implementasi	Efektif

Kota/Provinsi	Program/Penelitian	Bentuk Kegiatan	Temuan/Data
(Jatim)	Mandiri	kebijakan sekolah berwawasan lingkungan	membangun budaya peduli lingkungan, meski masih ada hambatan sarana & partisipasi
Bandar Lampung	Program Sekolah Berwawasan Lingkungan	Survei di 17 SMA Negeri	Belum semua indikator terlaksana dengan baik; ada variasi antar sekolah
Makassar (Sulsel)	Pemanfaatan lingkungan sekolah untuk pembelajaran IPA	Lingkungan sekolah dijadikan sumber belajar (kelas IV SD Inpres BTN IKIP I)	Nilai rata-rata siswa meningkat dari 67,33 menjadi 80,33 setelah program diterapkan

Sumber : Penelitian Terdahulu, (Data diolah Peneliti, 2025)

Tabel 1.3 diatas memperlihatkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia, program edukasi dan sosialisasi lingkungan dijalankan dengan pendekatan yang beragam. Di DKI Jakarta, DLH menjalankan program edukasi melalui *Kampung Iklim*, pengelolaan sampah plastik, serta sekolah adiwiyata, dengan catatan kegiatan terdokumentasi secara sistematis melalui portal *Satu Data Indonesia*. Di Surabaya, terdapat dua contoh nyata: program *Pelajar Unggul Ramah Lingkungan (PURING)* yang efektif meningkatkan kepedulian siswa SMP terhadap penghijauan dan

pengelolaan sampah, serta program PLPBK yang berbasis komunitas, berhasil memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Kebijakan Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Malang juga terbukti mampu menumbuhkan budaya peduli lingkungan di kalangan pelajar, meskipun masih terkendala sarana dan tingkat partisipasi. Kondisi serupa terlihat di Bandar Lampung, di mana survei pada 17 SMA Negeri menunjukkan penerapan program sekolah berwawasan lingkungan masih bervariasi antar sekolah. Di Makassar, edukasi berbasis lingkungan bahkan berdampak langsung pada capaian akademik siswa. Penelitian di SD Inpres BTN IKIP I menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa yang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar meningkat signifikan, dari 67,33 menjadi 80,33.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isu sosial terkait efektivitas program edukasi lingkungan di berbagai kota besar menunjukkan pola tantangan yang hampir sama dan masih dominannya pendekatan seremonial, keterbatasan sarana, serta perlunya partisipasi aktif masyarakat. Namun, praktik-praktik tersebut juga membuka peluang pembelajaran lintas daerah, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi strategis dalam merumuskan strategi edukasi lingkungan yang tidak hanya relevan di Jawa Barat, tetapi juga memiliki nilai komparatif di tingkat nasional.

Secara regulatif, pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan juga mendapatkan dukungan kuat dari berbagai kebijakan nasional dan daerah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 63 yang mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Dukungan regulatif juga diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta integrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 11 dan 13 yang menekankan peran masyarakat dalam mewujudkan kota berkelanjutan dan

ketahanan terhadap perubahan iklim.

Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, edukasi dan sosialisasi lingkungan menjadi instrumen utama dalam membangun perilaku masyarakat yang berwawasan ekologis. Banyak penelitian terdahulu telah mencoba menggambarkan bagaimana edukasi lingkungan dilakukan di berbagai wilayah. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan terbatas pada ruang lingkup formal seperti institusi pendidikan atau lembaga pemerintahan, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perubahan perilaku di tingkat komunitas.

(Maula, 2019) dalam penelitiannya di Yogyakarta memfokuskan kajian pada penerapan pendidikan lingkungan di sekolah dasar. Penelitian tersebut menyoroti peran guru dan kurikulum dalam menyampaikan nilai-nilai lingkungan kepada peserta didik. Meskipun hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman lingkungan pada siswa, penelitian ini belum menjangkau dinamika partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan tidak mengevaluasi dampak jangka panjang dari edukasi tersebut terhadap perilaku konkret masyarakat. Sementara itu, (Putra, 2023) mengkaji kegiatan sosialisasi lingkungan oleh pemerintah Kota Tangerang. Kajian ini lebih menitikberatkan pada jenis kegiatan yang dilakukan, seperti seminar, kampanye, dan pelatihan. Namun, studi ini tidak menilai secara holistik bagaimana kegiatan tersebut berdampak terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta belum mengevaluasi sejauh mana kegiatan tersebut mampu mendorong perubahan perilaku secara nyata.

Dari kedua penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian mengenai edukasi dan sosialisasi lingkungan masih berfokus pada aspek implementatif, yaitu menjelaskan jenis kegiatan dan proses pelaksanaan program. Padahal, efektivitas suatu program tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan, menyentuh sasaran secara tepat, dan menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara nyata. (Creswell, 2014) menegaskan bahwa kesenjangan penelitian (*research gap*) sering kali muncul ketika suatu fenomena telah banyak dikaji secara deskriptif, tetapi belum dinilai secara evaluatif dan mendalam. Dalam konteks ini, kajian

tentang edukasi lingkungan di Indonesia masih minim dalam hal pengukuran efektivitas, terutama dari perspektif penerima manfaat atau masyarakat sebagai objek utama perubahan perilaku.

Hingga saat ini, kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis efektivitas pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh DLH Provinsi Jawa Barat masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang menyoroti secara mendalam strategi komunikasi yang digunakan, pendekatan penyampaian pesan, tingkat partisipasi masyarakat, hingga dampaknya terhadap perubahan perilaku sehari-hari. Selain itu, aspek persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran utama dari kebijakan edukasi lingkungan juga jarang digali lebih jauh. Padahal, respons masyarakat terhadap materi edukasi, cara penyampaiannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program sangat penting untuk dianalisis. Lebih jauh lagi, hubungan antara pelaksanaan program edukasi dan perubahan perilaku nyata masyarakat Jawa Barat, yang seharusnya menjadi indikator keberhasilan, juga belum banyak diteliti secara sistematis. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya yang kemudian akan menjadi *gap penelitian* penelitian ini diharapkan bisa mengisi ruang kosong tersebut dan memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dalam menjawab tantangan riil edukasi lingkungan di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada evaluasi efektivitas program edukasi dan sosialisasi lingkungan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat dengan menitikberatkan pada pengalaman dan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Hal ini penting mengingat selama ini keberhasilan program lebih banyak diukur dari jumlah kegiatan dan peserta yang terlibat, sementara dampak nyata terhadap pemahaman, partisipasi, dan perubahan perilaku masyarakat belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga menawarkan analisis yang komprehensif, mulai dari perencanaan dan strategi komunikasi yang digunakan, media yang dipilih, hingga sejauh mana hasil kegiatan mampu menumbuhkan kesadaran ekologis dan praktik pengelolaan lingkungan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan berbasis bukti sekaligus menghadirkan strategi edukasi yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat Jawa Barat yang beragam.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat ketika dikaitkan dengan situasi krisis iklim global yang memerlukan tindakan nyata dan kolektif dari semua lapisan masyarakat. Edukasi lingkungan tidak bisa lagi dilakukan secara simbolis atau hanya untuk memenuhi target kegiatan tetapi harus menjadi sarana transformasi sosial yang mampu mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungannya (Rodríguez Luna & Varela, 2024). Dalam hal ini, pendekatan seperti *Behavior Change Communication (BCC)* sangat relevan karena mampu menyorot aspek kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran dan sikap), serta psikomotorik (tindakan) masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan kompleksitas persoalan lingkungan di Jawa Barat, kesenjangan efektivitas program edukasi, serta kebutuhan akan pendekatan berbasis partisipasi dan budaya lokal, maka diperlukan sebuah penelitian yang komprehensif dan mendalam. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji sejauh mana **“Efektivitas Program Edukasi dan Sosialisasi Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat”** dari berbagai aspek, termasuk strategi komunikasi yang digunakan, keterlibatan masyarakat, hambatan pelaksanaan, dan dampak terhadap perubahan perilaku.

B. Identifikasi Masalah

1. Timbulan sampah di Jawa Barat masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 25.000 ton per hari, dengan sekitar 3,7 juta ton/tahun belum tertangani secara optimal, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan.
2. Kegiatan edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat bersifat variatif tetapi belum jelas bagaimana efektivitas setiap kegiatan tersebut terhadap perubahan perilaku masyarakat.
3. Indikator keberhasilan program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat selama ini lebih menekankan pada

jumlah kegiatan dan partisipasi peserta, sementara dampaknya terhadap perilaku nyata masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum terlihat signifikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana ketepatan waktu pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat?
3. Bagaimana ketepatan sasaran penerima dalam program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pencapaian tujuan program edukasi dan sosialisasi lingkungan dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, serta perubahan perilaku masyarakat terhadap isu lingkungan di Jawa Barat?
5. Bagaimana bentuk perubahan nyata yang ditimbulkan dari pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap program edukasi serta sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis ketepatan waktu pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.
3. Untuk menilai ketepatan sasaran penerima program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pencapaian tujuan program edukasi dan sosialisasi lingkungan dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, serta perubahan perilaku masyarakat terhadap isu lingkungan di Jawa Barat.

5. Untuk mengidentifikasi bentuk perubahan nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori-teori di bidang pendidikan lingkungan, khususnya mengenai metode komunikasi yang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap teori kebijakan publik, dengan memberikan wawasan baru terkait penerapan kebijakan edukasi dan sosialisasi lingkungan dalam konteks daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

2. Secara Praktis

a. Untuk Peneliti

Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi program pemerintah, serta memperdalam keterampilan dalam metodologi kualitatif.

b. Untuk Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan reputasi akademik dengan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan relevan, serta memperkaya kurikulum dan diskusi akademik tentang isu lingkungan.

c. Untuk Instansi

Bagi instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian ini memberikan masukan untuk merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

d. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, dengan memberikan

pemahaman yang lebih baik tentang tantangan pengelolaan sampah, konservasi air, dan pelestarian alam.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilandasi oleh pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 yang menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya, permasalahan lingkungan di Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan kondisi yang cukup kompleks, seperti tingginya timbulan sampah, pencemaran lingkungan, serta belum optimalnya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih memerlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dalam mendukung tujuan kebijakan lingkungan daerah. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas (Sutrisno, 2007) dengan lima indikator utama:

1. Pemahaman Program

Indikator ini dipakai karena inti dari program edukasi adalah transfer pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Apabila pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan baik, maka tujuan edukasi tidak akan tercapai. Pemahaman masyarakat terhadap isi, tujuan, dan manfaat program menjadi dasar dari keberhasilan intervensi kebijakan ini.

2. Ketepatan Waktu Pelaksanaan

Indikator ini digunakan karena keberhasilan suatu program edukasi juga ditentukan oleh kesesuaian waktu pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dijalankan secara tepat waktu, terjadwal, dan Sebaliknya, apabila kegiatan dilakukan hanya bersifat seremonial, maka pesan yang disampaikan berisiko tidak efektif dan sulit menumbuhkan perubahan perilaku. Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam memastikan kontinuitas dan keberhasilan program edukasi lingkungan.

3. Ketepatan Sasaran Penerima

Efektivitas program sangat bergantung pada sejauh mana kegiatan sosialisasi

diarahkan kepada kelompok masyarakat yang tepat, baik secara demografis, geografis, maupun sosial-budaya. Apabila program menasar komunitas yang kurang relevan dengan permasalahan lingkungan, maka dampaknya akan minim. Oleh karena itu, ketepatan sasaran dipandang sebagai indikator krusial dalam mengevaluasi jalannya program.

4. Pencapaian Tujuan

Setiap program publik pada akhirnya diukur dari sejauh mana tujuannya tercapai. Dalam hal ini, pencapaian tujuan mengacu pada peningkatan kesadaran, partisipasi, dan perubahan sikap masyarakat terhadap isu lingkungan. Indikator ini merepresentasikan outcome program, bukan sekadar output administratif, sehingga dapat menunjukkan keberhasilan program secara lebih substantif.

5. Perubahan Nyata

Indikator ini menekankan pada hasil akhir dari program edukasi dan sosialisasi lingkungan yang dijalankan, yaitu adanya perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan nyata dapat dilihat dari meningkatnya praktik pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, berkurangnya volume sampah yang tidak terkelola, serta munculnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, perubahan nyata menjadi tolok ukur penting karena menunjukkan apakah program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat benar-benar memberikan dampak jangka panjang terhadap kesadaran ekologis masyarakat, bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah kegiatan atau peserta semata.

Dengan indikator ini, penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana program edukasi dan sosialisasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat benar-benar berdampak pada peningkatan pemahaman, partisipasi, serta perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hasil akhirnya diharapkan memberikan gambaran efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, serta menawarkan strategi edukasi yang adaptif dan berbasis partisipasi masyarakat untuk mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan. Maka peneliti menyajikan kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti, diantaranya:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Diolah Peneliti, (2025)